

## Sastra Dan Politik Lokal: Representasi Politik Lokal Bima Sebuah Kajian Sosiologi Sastra

Farizan Fahmi<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>

Universitas Qamarul Huda Badaruddin Lombok Tengah

**Abstrak.** Ketegangan sastra dan politik sudah lama terjadi. Sejak masa kolonialisme, ketegangan antara sastra dan politik sudah terjadi. Pemerintah kolonialisme cenderung memisahkan antara sastra dan politik. Ketegangan tersebut kembali terjadi di era orde baru, dimana sastrawan yang menghasilkan teks sastra yang berbau politik akan menanggung resiko yang berat. Hal itu dibuktikan dengan deretan sastrawan yang hilang tanpa jejak gegara menciptakan sastra yang berbau politik. Ketegangan sastra dan politik tidak berhenti dan bahkan tidak akan berhenti. Ada banyak sastrawan melalui teks sastra menggunakan bahasa “satire” berbicara politik lokal. Sastrawan mampu menggambarkan perilaku politik lokal secara utuh dan sempurna. Atas dasar itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bentuk praktik politik lokal dijalankan oleh penguasaan, serta ingin mengetahui peran penguasaan (*Lokal bossism and local strong men*) dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Politik Lokal dan Sosiologi Sastra. Kedua teori tersebut digunakan untuk melihat ketegangan sastra dan politik lokal yang ada di Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *critical discourse analysis* (diskursus analisis kritis). Karena dalam penelitian ini menggunakan subjek karya sastra maka sangat cocok digunakan pendekatan *critical discourse analysis* tersebut. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan subjek sastra, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa pola yang dilakukan oleh penguasaan dalam mempertahankan kekuasaannya, salah satunya bermain dengan menggunakan *local strongmen*. Dalam kalimat lain bahwa penguasaan menggunakan orang - orang kuat yang ada di daerah untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, baik itu pemodal, tokoh tokoh, dan lain sebagainya. Penguasaan mencoba memasukan investor (tambang) ke daerah Bima demi mendapatkan modal pribadi. Namun, pola - pola seperti itu di lawan oleh anak anak muda (aktivis). Mereka tidak pola seperti itu ada di daerah Bima.

**Kata Kunci :** Sastra, Politik Lokal, Sosiologi Sastra

### PENDAHULUAN

Sastra dan politik merupakan dua bidang ilmu yang memiliki konsentrasi yang berada. Sastra berbicara tentang teks fiksi yang dihasilkan oleh para sastrawan, namun memiliki hubungan erat dengan masyarakat. Pasalnya, sastra lahir atas kondisi yang dialami oleh pengarang dimana karya sastra tersebut diciptakan. Sedangkan politik berbicara tentang kebijakan yang diambil oleh para penguasaan (negara maupun daerah). Kebijakan tersebut berkaitan dengan masyarakat pula. Melihat konsentrasi kedua bidang ilmu tersebut, maka sastra memiliki hubungan erat dengan politik. Sebab, kedua bidang ilmu tersebut sama-sama berbicara tentang kondisi masyarakat. Namun,

dalam sejarah sastra Indonesia, sastra dan politik tidak pernah hidup berdampingan secara damai dan harmonis, bahkan sejak awal pertumbuhannya, (Taum, 2015). Hal itu disebabkan karena kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memisahkan antara sastra dan politik. Karya sastra yang berbicara tentang politik tentunya tidak memiliki tempat yang baik dihati kolonial. Kondisi seperti itu, kembali terjadi pada masa orde baru. Masa orde baru sastrawan yang menghasilkan teks sastra yang berbau politik, maka mereka harus menanggung resiko. Lihat saja deretan sastrawan yang hilang tanpa jejak, salah satunya adalah Widji Thukul. Widji Thukul melalui

karya-karyanya merupakan salah satu sastrawan yang selalu berbicara tentang kondisi sosial politik.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, tidak heran masyarakat pada umumnya, dan para sastrawan pada khususnya beranggapan bahwa harus menjauhkan diri dari politik (sastra harus bersifat apolitis, dan bahkan karya sastra yang berbicara tentang politik harus mendapat cacian atau sumpahan dari berbagai kalangan. Sastra seolah-olah tidak boleh berhubungan langsung dengan kehidupan nyata karena sastra hanya dipahami sebagai karya fiksi, (Taum, 2015). Namun, pandangan tersebut di atas ditolak oleh kritikus sastra postmodern (pasca moderen), misalnya di Indonesia, tokoh yang mengkritisi tentang sastra harus apolitis tersebut adalah Arif Budiman, Gunawan Muhammad, dan sederet kritikus lainnya. Sedangkan tokoh luar (Barat) yang mengkritisi pandangan (sastra harus menjauhkan diri dari politik) adalah Jameson, Eagleton, Stuart Hall, dan lainnya. Bagi mereka bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral, begitu juga dalam ilmu sastra.

Sebab dalam karya sastra terdapat sederet ideologi. Untuk itu, tugas kritikus sastra harus membongkar hubungan gelap antara sastra dan ideologi. Sejalan dengan itu, Eagleton, (1983) mengatakan bahwa tugas kritikus sastra adalah mendefinisikan hubungan antara sastra dan ideologi. Menurut Eagleton, politik adalah semua cara pengaturan kehidupan bermasyarakat yang melibatkan kekuasaan di dalamnya. Kritikus sastra post-modern pun mengusulkan tentang pentingnya ilmu baru dalam tubuh kritik sastra. Mereka mengusulkan tentang "metode kritik politik."

Menurut mereka bahwa, Teks sastra mengandung resonansi sosial, historis, dan politis. Sebuah teks sastra hanyalah permukaan yang mengubur sejarahnya yang hakiki. Karena itu, pentinglah mengungkapkan "ketidaksadaran politis" dalam teks-teks sastra yang menawarkan strategi bagi penghilangan kontradiksi-kontradiksi sejarah, (Taum, 1997).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa ada banyak sastrawan yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang konsen berbicara politik melalui karya-karya yang mereka

hasilnya. Misalnya, Pramoedya Ananta Toer, Widji Thukul, Ismail Marzuki, dan sederet sastrawan lainnya. Di Barat, yang memulai berbicara tentang politik adalah Friedrich Nietzsche melalui karyanya yang berjudul *Der Wille zur Macht* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Walter Kaufmann dan R.J. Holingdale, menjadi *The Will to Power*. Karya tersebut lahir atas dasar terinspirasi dari karya Arthur Schopenhauer, mengenai konsep tentang *the will to life*. Menurut Schopenhauer, bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini digerakkan oleh hasrat untuk hidup. Hasrat itulah yang terdapat pada semua makhluk hidup untuk menolak kematian. Dan: menghasilkan ciptaan yang bermakna.

Menurut Porter dalam Wattimena, (2011) bahwa setidaknya ada tiga konsep dasar yang terkandung dalam *The Will of Power*, yakni (1) kehendak untuk berkuasa sebagai abstraksi dari realitas, (2) sebagai aspek terdalam sekaligus tertinggi dari realitas (*the nature of reality*) dan (3) sebagai realitas itu sendiri apa adanya (*reality as such*). Secara praktiknya, di Amerika Latin bahwa mereka (sastrawan) harus melibatkan diri dalam dunia politik praktis. Sebab mereka tidak ingin jadi follower (pengikut) kaum kolonial. Mereka memilih nasionalis yang lahir dari budaya mereka sendiri. Bangsa-bangsa itu lebih memilih realisme magis (magic realism) ketimbang menjadi budak peniru Barat. Itu semua karena intelektual Amerika Latin sangat paham politik, (Sudyarto). Menurut, Sudyarto, bahwa ada untungnya bagi para penguasa jika sastrawan mandul politik, ia (para penguasa, baik itu penguasa Negara maupun daerah) tidak akan mengganggu orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan politiknya. Merujuk dari pernyataan tersebut, maka sastra bukanlah fiktif belaka berbicara tentang politik, ia merupakan karya fiksi yang selalu menginspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh para penguasa (negara maupun daerah).

Melihat fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik meneliti tentang ketegangan antara Sastra dan Politik lokal ; Representasi Politik Lokal Bima, dalam hal ini politik di

wilayah Bima – Nusa Tenggara Barat. Untuk melihat ketegangan ini (Sastra dan Politik Lokal), peneliti menggunakan sebuah kajian sosiologi sastra. Dalam kalimat lain bahwa, peneliti melihat ketegangan tersebut dengan kacamata sastra. Bima sebagaimana dengan daerah – daerah lainnya, pernah mengalami ketegangan yang begitu dahsyat dan bahkan menelan korban. Namun dalam penelitian ini, peneliti melihat ketegangan itu lewat teks sastra, karena ada banyak teks sastra yang berbicara politik lokal dalam hal ini politik Bima. Teks sastra yang dihasilkan oleh pengarang tersebut tidak berbicara politik secara langsung, namun mereka berbicara secara "satire."

Dalam kalimat lain bahwa, pengarang menggunakan simbol – simbol budaya. Simbol – simbol budaya yang ada di dalam teks tersebutlah yang ingin dibongkar dalam penelitian ini. Karya sastra yang berbicara tentang politik lokal, di antaranya Bima Berdarah karya Arif Rahman, dan Sang Predator karya Hamjah Diha. Kedua karya sastra tersebut menurut peneliti cukup representatif untuk melihat politik lokal di wilayah Bima karena kedua karya tersebut merupakan novel sejarah yang mengisahkan bagaimana perjuangan masyarakat Bima untuk melawan para penguasa. Pilihan karya sastra untuk melihat ketegangan politik lokal disebabkan karena penulis menyakini bahwa karya sastra lahir atas kontemplasi pengarang terhadap kondisi sosial, budaya, dan politik dimana karya sastra tersebut lahir. Dalam kalimat lain bahwa karya sastra lahir bukan hanya mengisi kekosongan budaya, melainkan ia hadir untuk penyambung lidah masyarakat dimana karya sastra itu lahir. Dalam konteks ini, penulis tidak melihat ketegangan politik dan sastra, akan tetapi penulis melihat ketegangan politik dalam teks sastra yang dikarang oleh pengarang tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimanakah praktik politik lokal dijalankan?, dan (b) bagaimanakah peran penguasaan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan?.

## TINJAUAN PUSTAKAN

### a. Konsep Sastra

Terry Eagleton dalam bukunya *Literary Theory* memulai pembicaraannya dengan sebuah pertanyaan terkait dengan "What is literature?." Pertanyaan tersebut memunculkan beragam jawabannya. Ada yang mengatakan bahwa sastra adalah tulisan yang "imajinatif," adapula yang mengatakan bahwa sastra adalah tulisan yang indah, dan masih banyak lagi definisi – definisi yang lainnya. Dalam bukunya tersebut, Terry Eagleton membantah bahwa jika sastra hanya disebut sebagai tulisan yang imajinatif. Dalam kalimat lain bahwa semua tulisan tersebut (sejarah, filsafat, dan lain sebagainya) adalah tulisan yang imajinatif, sebab antara "fakta" dan "fiksi" itu tidak bisa dibedakan nilai kebenarannya. Ia mencontohkan bahwa di akhir abad keenam belas dan awal abad ketujuh belas di Inggris, novel dan laporan berita tidak jelas mana yang faktual dan mana yang fiktif. Menurut Eagleton, jika tulisan yang "kreatif" dan "imajinatif" itu hanya ditujukan kepada sastra, maka apakah tulisan dalam ilmu lain itu tidak "kreatif" dan "imajinatif?". Untuk itu, Eagleton mencoba mendefinisikan sastra sebagai *literature is definable not according to whether it is fictional or 'imaginative', but because it uses language in peculiar ways*, Eagleton, (1996 : 2). Dalam pandangan Eagleton bahwa sastra memiliki struktur dan hukum tersendiri yang dapat dianalisis atau dipelajari dalam dirinya sendiri.

Sementara Klarer mendefinisikan sastra adalah *as the entirety of written expression, with the restriction that not every written document can be categorized as literature in the more exact sense of the word*, Klarer, (1998 : 1). Dari kedua pandangan tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa sastra adalah tulisan yang memiliki nilai – nilai keindahan dengan menggunakan bahasa yang unik. Dalam karya sastra, selalu dibumbui dengan nilai – nilai keindahan dan nilai – nilai seni, namun tidak mengabaikan fakta sosial.

*The literary work was neither a vehicle for ideas, a reflection of social reality nor the incarnation of some transcendental truth : it was a material fact, whose functioning could be*

*analysed rather as one could examine a machine. It was made of words, not of objects or feelings, and it was a mistake to see it as the expression of an author's mind, Eagleton, (1996 : 2 -3).*

Merujuk dari pendapat di atas bahwa sastra merupakan sebuah fakta material, bukanlah sebuah ekspresi seorang penulis. Sejalan dengan itu, Diha, (2017 : 13) mengatakan bahwa,

karya sastra tidak hanya dilihat dari bagaimana seorang pengarang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, melainkan lebih ia (karya sastra) harus dilihat bagaimana nilai dan ideologi itu hidup dalam karya sastra tersebut.

Ideologi atau nilai yang ada di dalam karya sastra tersebut tidaklah diungkapkan secara terang-terang oleh seorang pengarang, namun ia (ideologi atau nilai) tersebut disembunyikan atau sengaja disembunyikan oleh pengarang. Menurut Macherey dalam Eagleton, (2002 : 62) mengatakan bahwa,

karya sastra terikat pada ideologi bukan dalam apa yang dikatakannya, melainkan dalam apa yang tidak dikatakannya. Dalam kebisuan-kebisuan sebuah teks, dalam celah-celah dan kekurangan-kekurangannya, kehadiran ideologi dapat dirasakan dengan sangat kuat. Kebisuan-kebisuan inilah yang harus di-"kuak" oleh seorang kritikus sastra.

Dalam konteks ini, peneliti ingin melihat karya sastra sebagai *social fact or material fact* yang terjadi di politik lokal Bima. Peneliti ingin melihat ketegangan politik lokal di daerah Bima dengan menggunakan kacamata sastra karena sastra sebagaimana yang diungkapkan oleh Stephen Greenbatt dalam Taum, (2015 : 20) sebagai dunia tunggal (*single realm*). Menurut Greenbatt bahwa dunia yang digambarkan dalam karya sastra bukanlah dunia alternatif, melainkan dunia tunggal (*single realm*). Dalam kalimat lain bahwa, karya sastra jangan dipandang sebagai dunia khayalan, melainkan harus dipandang sebagai dunia material. Untuk itu, peneliti mencoba melihat politik lokal Bima melalui karya sastra yang lahir dari lokal Bima. Dalam kalimat lain bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah teks sastra yang

akan dihubungkan dengan kondisi sosial yang terjadi di daerah Bima.

#### b. Politik Lokal

Bicara tentang ketegangan sastra dan politik akan selalu menarik diperbincangkan, baik itu diperbincangkan di kedai kopi hingga di ruangan berACC, karena kehadiran sastra tidak pernah lepas dari fenomena sosial budaya, lebih-lebih politik. Fenomena sosial budaya tersebut, diungkapkan oleh si pengarang dalam bentuk teks. Fenomena tersebut, bukanlah sebuah khayalan seorang pengarang, akan tetapi realitas sosial budaya hasil kontemplasi atau renungan seorang pengarang. Sejalan dengan itu, (Sugiarti, 2015 : 233) mengatakan bahwa;

karya sastra merupakan rekaman keseluruhan kehidupan manusia beserta liku-likunya. Ia dihadirkan dalam bentuk pengalaman baru. Pengalaman tersebut diungkapkan dalam dunia baru sebagai hasil penggambaran batin pengarang dalam melihat, memahami, merasakan, mengapresiasi dari realitas kehidupan yang sesungguhnya. Realitas yang telah mengalami rekaan atas dasar imajinasi, kontemplasi, maupun interpretasi.

Merujuk dari pendapat di atas bahwa karya sastra merupakan representasi kehidupan sosial budaya masyarakat yang dihadirkan oleh pengarang. Kondisi sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat, direka ulang oleh si pengarang dengan menggunakan tokoh rekaan pula. Maka tidak salah Marx menyakini bahwa sastra tidak lepas dari fenomena sosial yang melingkupinya, Anwar dalam Sugiarti, (2015 : 232).

Dalam konteks ini, sastra juga akan masuk dalam politik lokal. Dalam kalimat lain bahwa sastra juga akan mengamati politik yang dimainkan oleh elit lokal. Namun, sastra tidak berbicara secara nyata, akan tetapi sastra hanya berbicara melalui tokoh rekaan. Sejalan dengan itu, Sugiarti, (2015 : 232) mengatakan bahwa politik dalam karya sastra (novel) diungkapkan pengarang secara kritis bagaimana sebenarnya politik itu dijalankan. Pengarang sebisa mungkin mengespresikan praktik elit lokal yang memainkan peran strategis untuk merebutkan kekuasaan. Politik lokal merupakan sebuah arena kontestasi bagi pelbagai kepentingan

ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya akan didistribusikan, (Hadiz, 2010). Kepentingan ekonomi maupun distribusi sumberdaya tersebut akan ditentukan oleh *'local bossism and local strong men'*. *Lokal bossism and local strong men* inilah yang akan berkuasa dibalik kebijakan penguasa atau kepala daerah.

#### c. Sosiologi Sastra

Sosiologi dan sastra merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, namun memiliki objek kajian yang sama, yakni sama-sama berbicara tentang kehidupan manusia dalam masyarakat, Diha, (2017 :38). Menurut Swingewood bahwa sosiologi dan sastra memiliki kesamaan konseptual. Menurutnya bahwa *sociology is essentially scientific, objective study of man in society, the study of social institutions and social process*. Merujuk dari pendapat di tersebut bahwa secara esensial bahwa sosiologi berbicara tentang kehidupan masyarakat, misalnya agama, ekonomi, politik, dan budaya, dan lain sebagainya. Semuanya itu, Swingewood menyebutnya dengan sosial struktur. Berkaitan dengan itu, sosiologi dan sastra memiliki konsentrasi yang sama, yakni berbicara tentang kehidupan manusia, hanya saja sastra berbicara melalui "satirenya". Dalam kalimat lain bahwa pengarang (sastra) berbicara tentang kehidupan manusia terkait dengan bahasa-bahasa simbol melalui tokoh – tokoh rekaan yang sengaja diciptakan oleh sastrawan tersebut. Swingewood mengatakan bahwa *Literature too is pre eminently concerned with man's social world, his adaptation to itu, and his desire to change it*.

Menurut Ratna, (2011 :4) bahwa sosiologi dan sastra berbicara tentang manusia dalam masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan kebudayaan. Hanya saja, perbedaannya menurut Ratna bahwa sosiolog menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat secara objektif melalui analisis ilmiah, sedangkan sastrawan menggambarkan kehidupan manusia secara imajinatif melalui tokoh-tokoh rekaan. Keningat kedua rumpun ilmu tersebut memiliki kesamaan, maka penulis mencoba

meneliti tentang ketegangan politik lokal yang ada di Bima yang terjadi selama ini. Namun penulis melihat ketegangan politik lokal Bima tersebut dalam teks sastra dengan menggunakan kacamata sosiologi sastra.

#### METODE PENELITIAN

Dalam ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *critical discourse analisis* (analisis wacana kritis). Jenis data dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa wacana, narasi, dan uraian yang didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan wacana sastra dan politik lokal yang terjadi di Bima. Data primer, yakni data yang didapatkan dalam novel sang predator karya Hamjah Diha dan novel Bima berdarah karya Arif Rahman. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode pemahana dan penafsiran dengan menggunakan kacamata Sosiologi Sastra. Dalam pemahaman kajian sastra dan filsafat, metode pemahaman (verstehen) disejajarkan dengan penafsiran (hermeneutika).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah (a) praktik politik lokal dijalankan oleh penguasa, dan (b) peran penguasaan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.

##### a. Praktik Politik Lokal yang Dijalankan oleh Penguasa

Politik tidak hanya dimaknai dengan politik praktis, melainkan juga bisa dimaknai dengan bagaimana memainkan peran dalam mengambil kebijakan. Begitu juga di politik lokal. Politik lokal adalah bagaimana cara penguasa memainkan peran dan mengambil kebijakan di sebuah daerah wilayah kekuasaannya. Sejalan dengan itu, Hadiz dalam Pernama, (2011 : 1) mengatakan bahwa politik lokal merupakan sebuah arena kontestasi bagi pelbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya akan didistribusikan.

Dalam konteks ini, penulis tidak membahas politik praktis, namun membahas kebijakan atau kepentingan yang dijalankan oleh penguasa, baik itu kepentingan ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dalam novel *Lambu Tarian Darah (LTD)* karya Arif Rahman, terdapat banyak kepentingan dan sumber daya yang didistribusikan oleh penguasa dalam hal ini kepala daerah. Banyak kebijakan kepala daerah yang dinilai merugikan masyarakat. Hal itu bisa dilihat pada kutipan di bawah ini.

“Di ujung lapangan bola, Delian mengumpulkan kawan - kawannya. Mereka memuntahkan nalar kritisnya terhadap kinerja kepala desa yang korup. Di bawahnya tidak ada kemajuan bagi desa, kemenangan melumpuhkan ingatannya terhadap janji - janji kampanye yang mebuai indera pendengar,” (LTD. Hal. 2)

Dalam teks tersebut, terlihat jelas bahwa penguasa hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan kelompok sehingga menyebabkan suatu daerah tidak ada kemajuan. Kebijakan ini tentu menyimpang dari semangat desentralisasi yang diperjuangkan oleh banyak orang. Desentralisasi adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi, baik dalam proses pengambilan keputusan di daerah, maupun dalam pelaksanaannya. Namun, hal itu tidak dijalankan di wilayah kabupaten Bima. Justru kran tersebut ditutup oleh para penguasa. Dalam kalimat lain bahwa kebijakan yang di ambil oleh penguasa tidak melibatkan masyarakat sipil. Hal itu dapat dilihat pada kutipan teks yang ada di dalam novel di bawah ini.

“Di lokasi itu, Delian juga melihat kabel bermacam macam warna, hitam, merah, dan putih. Persis warna bendera yang ditancap. Besar kabelnya bervariasi, dari yang kecil hingga besar. Delian menarik kabelnya tapi kabel ini panjang sekali seolah olah tak berujung. Delian makin heran dan terus bertanya dalam dirinya.” (LTD. Hal. 10).

Dalam teks tersebut terdapat sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, yakni memasukan investor (tambang) secara

diam - diam tanpa ada musyawarah dengan masyarakat setempat. Padahal, masyarakat tidak menginginkan adanya tambang tersebut, sebab menurut masyarakat setempat bahwa adanya tambang tersebut akan merusak lingkungan. Disinilah masyarakat mulai bangkit untuk melawan kebijakan tersebut. Karena mereka menganggap kebijakan yang diambil oleh penguasa tidak melibatkan masyarakat. Perlawanan masyarakat dapat dilihat dari teks dalam novel LTD di bawah ini.

“Tak mungkin bapak sebagai kepala wilayah tak tahu datangnya kabel itu, bapak sudah kongkalikong dengan kekuasaan, pokoknya kami anak muda menokal tambang. Sebab, tambang adalah kehancuran bagi masa depan bumi tempat kita berpijak, pelecehan martabat kami sebagai anak petani, kami tetap melawan apapun resikonya, biar peluru mencabik jiwa dan raga, biar kami melebur menjadi tanah dalam dekapan ibu pertiwi, hanya satu kata, lawan!. Agitiasinya Ipang.” LTD. Hal. 14 – 15.

Teks tersebut seloah - olah kepala wilayah tidak tahu menahu tentang sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaannya (tambang yang masuk di wilayahnya). Merujuk dari pernyataan tersebut, bahwa politik atau kebijakan yang dimainkan oleh penguasa lokal dalam menjalankan kekuasaannya terdapat beberapa pola, salah satunya adalah memanfaatkan *lokal strong men* (orang kuat lokal). *Lokal strong men* adalah orang yang memiliki power dalam menekan masyarakat sipil.

Ketegangan itu, tidak hanya terjadi pada novel LTD, namun jugaterlihat pada novel *Sang Predator*. Dalam novel *sang predator* secara tidak langsung penguasa menggunakan orang kuat lokal (*bossisme*) dalam hal ini preman untuk menekan warga sipil dalam menjalankan suatu kebijakan tersebut. Hal dapat dilihat pada teks novel *sang predator* di bawah ini

“Dia mengirim dua orang pasukannya untuk melihat kebenaran fakta seputar kecantikan La Lise seperti yang dibicarakan kebanyakan orang.

“kalian segera pergi kerumah La Lise,”

“Iya sang sangaji, apa yang kami lakukan di sana?”

“lihat apakah La Lise itu betul-betul cantik atau tidak?”. (Sang Predator, Hal. 99)

Teks tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk menjalankan kebijakannya, penguasa menggunakan jasa preman. Dalam kalimat lain bahwa preman melakukan intimidasi kepada warga sipil sehingga kebijakan yang diambil oleh penguasa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa, tanpa melihat apakah warga dirugikan atau tidak. Untuk melihat kebijakan penguasa tersebut dijalankan dengan paksa, maka kita dapat melihatnya pada teks yang ada di novel sang predator di bawah ini.

“Setelah itu, Ngaro La Ngawu merencanakan untuk mengambil La Lise di tangan La Bambang untuk dijadikan istri dan La Lise harus tinggal bersamaanya di istana. Itulah kekejaman Ngaro La Ngawu. Setiap yang ia rencanakan harus terjadi,” (Sang Predator, hal.100).

Merujuk dari penjelasan di atas dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketegangan politik dan sastra sungguh terjadi di kabupaten Bima. Hal itu terlihat jelas beberapa teks yang ada pada novel LTD karya Arif Rahmat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya ketegangan antara warga dan penguasa dalam menjalankan suatu kebijakan yang di putuskannya.

#### **b. Peran Penguasaan dalam Merebut dan Mempertahankan Kekuasaan.**

Novel merupakan genre sastra yang menggambarkan pengalaman - pengalaman manusia. Gambaran tersebut, tidak secara langsung digambarkan oleh pengarang. Pengarang menggambarkan pengalaman tersebut melalui tokoh - tokoh rekaan atau melalui bahasa kiasan. Pengalaman manusia sangat komplis, salah satunya adalah politik. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa politik tidak hanya dimaknai dengan politik praktik semata, melainkan juga harus dimaknai dengan kebijakan penguasa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Eagleton dalam Taun, (2015 : 3) mengatakan bahwa politik adalah semua cara pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat yang melibatkan

kekuasaan di dalamnya. Dalam konteks ini, novel TLD dan Sang Predator membahas tentang kebijakan yang dijalankan oleh penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Dalam teks novel Sang Predator menggambarkan kezholiman yang dilakukan oleh penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal itu bisa dilihat dalam teks Sang Predator di bawah ini.

“Kehadiran La Adam merupakan sebuah keniscayaan bagi peradaban dikala itu. Karena La Adam merupakan titipan Sang Ilahi sebagai pemimpin bagi Negeri. Kehadiran La Adam merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat kampung diha kala itu, karena ia akan mengelolah Bumi ini kelak dengan baik. Serta ia akan melawan kemungkaran yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Ia akan melawan kezholiman yang dilakukan oleh rezim kala itu.” Sang Predator hal 42.

Selain itu, penguasa juga dalam mempertahankan kekuasaannya, dapat memanfaatkan orang kuat lokal (*lokal strong men*). *Lokal strong men* adalah orang orang lokal yang memiliki *power* dalam menekan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil oleh penguasa dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh penguasa. Hal itu bisa kita lihat dalam teks novel TLD di bawah ini.

“Pertarungan ini sudah dimulai, ini awal dari perjalanan yang dilalui, harus dilewati dengan keyakinan dan do’a. Sebab, kekekalan do’a adalah hakiki. Kami merasa dengan perasaan, bahwa penindasan ada di depan mata, tergantung bagaimana mata batin melihat dan merasakannya. Perasaan batu sebagai makhluk hidup memang tak bernyawa, tapi kalau digusur pasti sakit, perasaan air yang akan tersumbat lantaran akan kayu tempat hidup dipotong, Perasaan binatang ternak yang bersaing dengan deru mesin tambang untuk mencari rumput hijau, ngilunya hati anak gembala diusir dari tempatnya tumbuh, pekikan teriakan Ama dan Ina kami lantaran lahan sawahnya akan dirampas. Hati hati Kades, balas Ipang”. LTD, hal. 17.

Dalam teks tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa kehijakan yang diambil oleh penguasa terdapat perlawanan dari masyarakat, dalam hal ini anak-anak muda. Namun penguasa menjalankannya secara paksa dengan memanfaatkan *local strong men*. *Local strong men* (orang kuat lokal) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh lokal yang memiliki kekuatan, baik itu tokoh masyarakat, pemodal, dan lain sebagainya demi mempertahankan kekuasaannya. Para bos lokal melakukan berbagai strategi untuk bisa bertahan hidup, memperluas dan mempertahankan kekuasaan dengan membentuk aliansi segitiga akomodasi, bersama aparat birokrasi negara, dan politisi di tingkat lokal, Migdal dalam Suaeb, dkk, (2015 : 52).

Bos lokal yang digambarkan dalam novel LTD adalah aparat birokrasi negara, dalam hal ini kepala desa dan camat. Camat melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang melakukan penolakan kebijakan yang dijalankan oleh penguasa. Hal itu bisa diteliti, dalam konteks ini, Sastra dan Politik Lokal; Representasi Politik Lokal Bima ; Sebuah Kajian Sosiologi Sastra. Simpulan berupa temuan – temuan yang didapatkan oleh peneliti dalam novel Lambu Tarian Darah karya Arif Rahman dan Sang Predator karya Hamjah Diha, sedangkan saran berupa rekomendasi untuk pihak – pihak terkait. Untuk lebih jelasnya, menyajikan sebagai berikut;

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam novel LTD dan Sang Predator, dapat ditarik simpulan bahwa dalam menjalankan kekuasaan (kebijakannya), maka penguasa dapat memanfaatkan orang kuat lokal (bossisme). Orang kuat lokal (Bosisme) baik itu aparaturnegara maupun lainnya. Bosisme dapat menekan atau melakukan intimidasi terhadap warga sipil sehingga warga sipil tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut. Hal itu tentu bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diperjuangkan oleh kebanyakan orang.

percakapan Camat dan sekcam Lambu pada teks novel LTD di bawah ini.

Camat : Idenya Bapak Sekcam bagaimana?

Sekcam: kita harus mendekati secara kekeluargaan anak-anak ini

Camat : pokoknya bereskan, pak sekcam yang tahu metodenya

Sekcam : gampang tak usah dipikirkan, Bapak camat tidur saja di rumah, masalah aksinya anak-anak ini saya yang akan bereskan

Sekcam : terimakasih bapak sekcam, memang bapak ini luar biasa.

Merujuk dari percakapan Camat dan sekcam tersebut di atas menunjukkan bahwa penguasa dalam menjalankan kebijakannya, maka penguasa memanfaatkan aparat tingkat bawah, yakni camat dan kepala desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menarik suatu simpulan serta memberikan saran terkait subjek yang telah Sebab, desentralisasi menginginkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Ketegangan Politik dan Sastra sungguh jelas terlihat dalam kedua novel tersebut. Ketegangan yang dimaksudkan di sini adalah kedua novel tersebut secara tidak langsung menggambarkan penguasa dalam menjalankan kebijakannya secara paksa. Tidak memperhatikan apakah masyarakat yang ia pimpin itu dirugikan atau tidak, yang ia perhatikan adalah kepentingan pribadinya dan kelompoknya.

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekuarang. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang mengambil tema tentang politik dan sastra ; representasi politik lokal agar dapat mengkajinya lebih rinci dan mendalam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, baik itu mahasiswa yang akan melakukan penelitian skripsi maupun dosen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diha, Hamjah. 2017. Teori Sastra ; Sebuah Pengantar Awal. Lembaga Penerbit Matatam. Yayasan Hamjah Diha
- Diha, Hamjah. 2017. Sang Predator. Lembaga Penerbit Matatam. Yayasan Hamjah Diha
- Eagleton, Terry. 2002. Marxisme dan Kritik Sastra. Depok. Desantara Press
- \_\_\_\_\_. 2003. Literary Theory An Introduction. The University of Minnesota Press
- Edkins Jenny dan Nick Vaughan Williams. Teori-Teori Kritis. Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
- Hadiz. 2019. Membaca Politik Lokal Bima. Lipi
- Ratna, Nyoman K. 2011. Paradigma Sosiologi Sastra. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
- Rahman, Arif. 2019. Sebuah Novel ; Lambu Tarian Berdarah. Mataram – Alam Tara Institute
- Martono, Nanang. 2015. Metode Penelitian Sosial. Konsep-konsep Kunci. Jakarta. Rajawali Press.
- Swingewood, Alan dan Diana Laurenso. *The Sociology of Literarure*. Paladi
- Sugiarti. 2015. Politik Lokal Dalam Novel *Jatisaba* Karya Ramayda Akmal. Surakarta. Seminar Nasional, Sastra, Pendidikan Karakter dan Industri Kreatif.
- Taum, Yosseph Yapi. 2015. *Sastra dan Politik. Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Jogjakarta. Universitas Sanata Drama Press
- Migda, Joel S. 2015. Orang Kuat (Strong Man) Dalam Politik Lokal.